

**PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN  
DAS SIAK: STUDI KASUS DAERAH HILIR DAS SIAK TAHUN 2010-2013**

**By : Reski Lestari**

**[Lestari\\_reski@yahoo.com](mailto:Lestari_reski@yahoo.com)**

**Supervisor : Drs. H. Muhammad Ridwan**

**Library of Riau University**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*This research is aimed to figure out how is the role of Riau Province Local Government on Siak Watershed Management (known as Daerah Aliran Sungai, DAS). It is focused to the downstream watershed of Siak River area considering to the most complex problem exists on it. Those problems consist of domestic waste, industry waste, residential issue. The role of local government on DAS management especially for downstream area is based on main duty and the function of each related government Departement. On this management there are no specific regulation in DAS management area. Based on this background, the research is aimed to analyze the role of Local Government in the Province of Riau on DAS management that is focused on the downstream of DAS.*

*The type of this research is description, which means the researcher gives a description or illustration about related phenomenon or social symptom which is analyzed by describing independent variable systematically and accurately. Data collection method is done by Indepth Interview and documnetation study.*

*The result of analysis shows that the role of local government on DAS management of downstream is based on "TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)" of each Departement. Departement of Living Environment (known as Badan Lingkungan Hidup, BLH) has a role on managing industry waste, domestic waste, Departement of Public Project (known as Dinas Pekerja Umum, PU) Riau Province Resicence Division has a role on resident management. While cooperation of each Departement is needed on DAS management.*

*Keywords: Role, Local Government, River Stream District*

## PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia semakin mengalami kerusakan lingkungan dari tahun ke tahun. Kerusakan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi kerusakan pada aspek biofisik ataupun kualitas air. Di Indonesia, kondisi DAS yang berada dalam kondisi kritis dan memerlukan prioritas penanganan mencakup 108 Daerah Aliran Sungai (Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.328/Menhut-II/2009). Luas lahan kritis masih terus berkembang dan telah mencapai 77,8 juta hektar (Departemen Kehutanan, 2007) yang tersebar di dalam kawasan hutan sekitar 51 juta ha dan di luar kawasan hutan kurang lebih seluas 26,8 juta ha. Tingginya jumlah DAS prioritas dan masih luasnya lahan kritis mengindikasikan masih lemahnya sistem pengelolaan DAS.<sup>1</sup>

Gejala Kerusakan lingkungan DAS dapat dilihat dari penyusutan luas hutan dan kerusakan lahan terutama kawasan lindung di sekitar Daerah Aliran Sungai. Dibeberapa Daerah Aliran Sungai di Indonesia mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dalam upaya pemulihan kualitas air. Salah satunya yaitu Sungai Siak Provinsi Riau.

Cakupan DAS Siak Provinsi Riau meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, dari keseluruhan wilayah DAS Siak terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu bagian

hulu dan hilir.<sup>2</sup> Bagian Hilir, bagian hilir dari DAS Siak adalah pada Sungai Siak Besar yang terletak di desa Palas (Kabupaten Kampar) - Kota Pekanbaru – Kota Perawang (Kabupaten Siak) – Kota Siak Sri Indrapura dan bermuara di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten Siak).<sup>3</sup>

Dalam pengelolaan DAS terdapat Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2012 pasal 2 ayat (2) pengelolaan DAS secara utuh diselenggarakan melalui tahapan: <sup>4</sup> . perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pembinaan dan pengawasan.

Landasan formal pengelolaan DAS di Provinsi Riau tepatnya pada pengelolaan bagian hilir DAS Siak yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi yang terkait dalam pengelolaan DAS Siak tersebut. Di antaranya Keputusan Gubernur Riau Nomor 12 tahun 2003 tentang Peruntukan Baku Mutu Air Sungai. Peraturan Gubernur Riau Nomor 13 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Undang undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Namun pada realitanya masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di DAS Siak. Jenis-jenis persoalan dan akar permasalahan di DAS Siak di wilayah hilir,

---

<sup>1</sup> Prof. Ris. Dr. Ir. Pratiwi, M.Sc, dkk. 2012. *Prociding Workshop Penelitian Dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Bogor: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR). Halaman 21

---

<sup>2</sup> Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Provinsi Riau Paparan Menteri Pekerjaan Umum Pada Acara Seminar Penyelamatan Dan Pelestarian Das Siak Di Pekanbaru, 6 Agustus 2005. Halaman 3.

<sup>3</sup>*Ibid*.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

disebabkan oleh persoalan limbah industri, limbah domestik, dan pemukiman. Dalam hal ini pertumbuhan industri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dampak dari peningkatan industri tersebut terjadinya peningkatan pencemaran berupa limbah. Di sekitar DAS Siak, banyak dijumpai pabrik-pabrik industri, yang mana sisa hasil produksi dari pabrik-pabrik ini akan dibuang ke Sungai Siak. Hasil produksi ini berupa limbah cair yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan di sekitar DAS Siak tersebut.<sup>5</sup> Rendahnya kesadaran dan tingkat pendapatan masyarakat, serta pola budaya masyarakat yang tidak mendukung sangat mempengaruhi pola lingkungan kehidupan masyarakat, misalnya pada pola masyarakat dalam pembuangan limbah domestik ke sungai. Hal tersebut apabila dilakukan secara berkesinambungan akan mempengaruhi lingkungan DAS tersebut.

Masalah sosial yang saat ini dihadapi oleh manusia serta secara umum meliputi berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh alam, dan tidak kalah dominannya adalah permasalahan yang berkenaan dengan kesadaran manusia itu sendiri.<sup>6</sup> Dalam hal ini pemukiman masyarakat yang tidak teratur dalam lingkungan DAS Siak juga akan mempengaruhi kerusakan kualitas dari air sungai. Pemukiman dikawasan DAS Siak secara umum masih terdapat beberapa pemukiman kumuh dan tidak sehat disekitar bantaran sungai dengan kepadatan penduduk

yang tinggi dengan angka kepadatan tertinggi dari 55.78 175 jiwa/HA.<sup>7</sup>

Kawasan kumuh di tepian sungai Siak dapat dilihat dari padatnya penduduk yang tinggal dikawasan tersebut, struktur bangunannya menggunakan bahan-bahan tradisional, tata kawasan yang tidak teratur dll. Seperti yang diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru pada [tribunpekanbaru.com](http://tribunpekanbaru.com), pekanbaru, Roni Amriel SH menyatakan, sungai sudah terlalu dijadikan sebagai halaman belakang, sekaligus 'kakus' oleh masyarakat. Budaya memperlakukan sungai tersebut menyebabkan, sungai seakan-akan menjadi tempat sampah. Padahal, peranan dan fungsi sungai amat vital.<sup>8</sup>

Dari beberapa persoalan permasalahan di DAS Siak, persoalan yang lebih kompleks terdapat di DAS Siak bagian Hilir. Sehingga dalam hal ini perlu kita menganalisa bagaimana peran pemerintah dalam mengelola persoalan-persoalan di DAS Siak khususnya di bagian Hilir DAS Siak. Oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian "Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan DAS Siak: Studi Kasus Daerah Hilir DAS Siak Tahun 2010-2013."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang penyajiannya secara deskriptif. Peneliti menggunakan konsep dan kerangka konseptual yang mana peneliti meninjau secara langsung objek penelitian, mencari data dan memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau

---

<sup>5</sup>Erik Darmawan. *Pelaksanaan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Cair Di Daderah Aliran Sungai Siak Kota Pekanbaru*. Halaman 2.

<sup>6</sup> Cahyo Seftyono. 2012. *Pembangunan Berbasis Waterfront dan Transformasi Konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal*. Vol 16 Nomor 1. Halaman 76.

---

<sup>7</sup> Penataan Kawasan Sungai Siak Pekanbaru Riau. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Sub Dinas Permukiman. Halaman 4.

<sup>8</sup> [tribunpekanbaru.com](http://tribunpekanbaru.com), pekanbaru. *DPRD: Tercemarnya Sungai Siak Juga Ulah Perusahaan*. Kamis, 21 maret 2013 08:27

dihadapi saat ini. Berdasarkan faktor yang tampak untuk kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Riau, karena daerah DAS Siak merupakan cakupan provinsi Riau. DAS Siak yang diteliti tepatnya pada bagian hilir DAS Siak, yang mencakup sungai Siak Besar yang terletak di desa Palas (Kabupaten Kampar) - Kota Pekanbaru – Kota Perawang (Kabupaten Siak) – Kota Siak Sri Indrapura dan bermuara di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten Siak).

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian, digunakan jenis penelitian deskriptif, peneliti memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti.

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi partisipatif, *indepth interview*, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. *Indept interview* yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang melakukan wawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis,

gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dari peran pemerintah dalam pengelolaan DAS Siak tepatnya dibagian hilir daerah aliran sungai Siak yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan *indept interview* dengan cara menghungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil dari reduksi tersebut dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan DAS Siak: Studi Kasus Daerah Hilir DAS Siak Tahun 2010-2013**

Melihat kenyataan DAS di Provinsi Riau semakin kritis, maka pengelolaan DAS harus mendapatkan perhatian yang khusus dengan membentuk wadah koordinasi tersendiri. Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2004 maka pemerintah Provinsi Riau mempunyai kewenangan membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat Provinsi Riau dalam upaya pengelolaan DAS Siak.

Peran Pemerintah daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan DAS Siak tidak terlepas dari sumber hukum dalam pengelolaan DAS. Dasar hukum dalam pengelolaan DAS adalah:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Op.cit.* Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Siak. Buku I (Buku Utama). Halaman 3.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

Dalam Praktek pengelolaan DAS peraturan-peraturan tersebut masih mendapatkan respon yang lemah. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS sampai tahun 2013 di Provinsi Riau belum ada. Sebelumnya forum DAS Siak telah mengajukan draft tentang pengelolaan DAS Siak. Dalam hal ini Prof. Adnan Kasry sebagai Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dipercaya menyusun rancangan Perda DAS Siak. Namun masalah pemberian nama dari lembaga tersebut yang menyebabkan draft pengelolaan DAS Siak sampai sekarang tidak disahkan.

Persoalan lemahnya dasar hukum tentang pengelolaan DAS Siak adalah salah satu hal yang menyebabkan masalah-

masalah di DAS Siak tetap ada sampai sekarang. Ditahun 2014 draft tentang pengelolaan DAS diajukan kembali atas inisiatif Komisi B. Ranperda inisiatif ini berdasarkan hasil kunjungan kerja Pansus DPRD Provinsi Riau ke Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan analisis penulis dari pembahasan Ranperda tentang pengelolaan DAS yang telah dilakukan, tampak bahwa perhatian pemerintah dalam pengelolaan DAS sangat lemah. Hal tersebut tampak pada;

1. Rendahnya partisipasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dalam menghadiri hiring pembahasan Ranperda. Padahal Ranperda ini sangat penting mengingat kompleksnya masalah yang terjadi di DAS tersebut;
2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap DAS, hal ini tercermin dari Ranperda yang diajukan baru pada tahun 2014, padahal masalah di DAS sudah terjadi jauh sebelumnya.

Pengelolaan DAS Siak yang telah dilakukan selama ini yaitu berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dari masing-masing instansi terkait. Dalam pengelolaannya sampai pada tahun 2013 belum ada Perda yang mengatur pengelolaan DAS sehingga belum adanya lembaga khusus dalam pengelolaan DAS Siak. Saat ini masing-masing dinas yang terkait membuat perencanaan sendiri atas DAS Siak sehingga yang terjadi bukan pengelolaan yang baik tetapi terjadi tumpang tindih dalam pengelolaannya. Masalah yang sering terjadi banyak pihak yang berkepentingan akibatnya sesuatu yang berhubungan dengan hak banyak dinas-dinas yang mengakui bahwa itu adalah kewenangannya, tetapi apabila terdapat

masalah didalamnya tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang terdapat di DAS Siak khususnya di bagian hilir DAS Siak, ada 3 masalah utama yang terjadi di DAS Siak yaitu masalah limbah industri, limbah domestik, dan masalah permukiman. Dalam pengelolaannya masalah-masalah ini di kelola oleh dinas-dinas yang terkait. Misalnya perencanaan dilakukan oleh Bappeda Provinsi Riau, masalah limbah industri dan limbah domestik dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, masalah permukiman dikelola oleh Dinas PU bidang Pemukiman Provinsi Riau.

#### **A. Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Pengelolaan Limbah Industri dan Limbah Domestik di DAS Siak.**

Peran BLH Provinsi Riau dalam pengelolaan limbah di DAS Siak berpedoman pada Keputusan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Siak Provinsi Riau. Dalam hal ini peran BLH yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas air di sungai Siak. BLH melakukan pengawasan apakah limbah yang dikeluarkan sesuai dengan baku mutu atau tidak. Dalam pengelolaannya yang paling sulit untuk ditangani ialah limbah domestik, karena menyangkut mindset atau pola pikir serta kebiasaan dari masyarakat.

Dalam pengelolaan limbah di DAS Siak, upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya;

#### **1. Melakukan penghijauan kembali DAS Siak.**

Pada tahun 2005 Pemerintah Pusat di bawah Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pembenahan sungai Siak. Pada

18 oktober 2005 disahkannya kesepakatan penyelamatan DAS Siak dengan bekerjasama dengan Dir Lingkungan UR. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak berkelanjutan. Berdasarkan analisis penulis tidak berjalan dan berkelanjutannya suatu kegiatan dikarenakan lemahnya komitmen dari pemerintah itu sendiri dari perencanaan yang telah dilakukannya serta rendahnya pemanfaatan DAS terhadap kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan ekonomi, misalnya pada transportasi air yang tidak dibangun secara khusus sehingga dapat menyumbang limbah di sungai Siak.

#### **2. Menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Siak tahun 2013.**

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Siak ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 424/KPTS/M/2013. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Siak yang selanjutnya dalam Pola ini disingkat WS Siak. Visi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Siak yaitu terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air di Sungai Siak yang selama ini menjadi jalur transportasi penting masyarakat Riau, meningkatkan kualitas airnya sehingga layak pakai serta pengelolaan terhadap permasalahan banjir khususnya di kota Pekanbaru di mana hal tersebut akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di WS Siak secara selaras berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Siak atau WS Siak ini belum terimplementasi.

---

<sup>10</sup> Pola Pengembangan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Siak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 424/KPTS/M/2013. Halaman 6.

Kurangnya sosialisasi menyebabkan pola ini belum berjalan.

Peran pemerintah dalam pengelolaan limbah di DAS Siak berdasarkan tugas dan fungsi dari dinas terkait. Koordinasi serta kerjasama antar dinas dalam pengelolaan limbah di DAS Siak kurang berjalan, sehingga setiap dinas hanya bekerja berdasarkan tupoksinya tidak adanya koordinasi dengan dinas lainnya.

### **B. Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Pengelolaan Permukiman di DAS Siak**

Persoalan permukiman di DAS Siak yaitu ketidakteraturannya pembangunan permukiman masyarakat di sekitar DAS. Kondisi dilapangan masih terdapat beberapa permukiman kumuh dan tidak sehat dihamparan bantaran sungai siak. Permukiman masyarakat yang tidak teratur dalam lingkungan DAS Siak akan mempengaruhi kerusakan kualitas dari air sungai Siak. Dalam hal ini peran pemerintah dalam menata permukiman harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peran Bidang Permukiman PU Provinsi Riau dalam pengelolaan permukiman di DAS Siak yaitu memfasilitasi, mensosialisasikan aturan-aturan yang berlaku terkait permukiman di DAS, sedangkan yang melaksanakan pengelolaan adalah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Salah satu program yang telah dibuat bidang permukiman (Renstra Bidang Permukiman Tahun 2013) program pengembangan perumahan permukiman fokus progam ini yaitu dukungan pembangunan rusunawa dan perbaikan lingkungan kumuh.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi riau dalam pengelolaan permukiman yaitu *Water River Front City*. *Water River Front City* dapat diartikan suatu perencanaan kawasan sungai (ruang, perairan, bantaran sungai dan lingkungan sekitar sungai) dimana sungai tidak lagi dimanfaatkan sebagai sisi belakang namun menjadi sisi depan dari pada wajah kota.<sup>11</sup> Pada dasarnya kawasan bantaran sungai Siak perlu dinormalisasikan, lebih diberdayakan dan diintegrasikan terhadap sistem pembangunan sarana dan prasarana kota, mengingat kawasan ini mewadahi beberapa kompleksitas signifikan potensi dan masalah lingkungan, seperti,<sup>12</sup>

1. Adanya pemukiman asli melayu dengan aktivitas budaya yang perlu dilestarikan;
2. Permukiman kumuh dan bangunan liar di sepanjang sungai dan dibawah tanggul yang perlu ditata;
3. Kawan grosir, warung, rumah makan dan toko yang perlu ditata;
4. Pasar lokal dan regional yang perlu dikembangkan;
5. Kawasan perkantoran, pendidikan, sosial yang perlu ditata;
6. Daerah hijau yang perlu dilindungi;
7. Lahan kosong yang perlu dioptimalisasikan pemanfaatan lahannya;
8. Pelabuhan dan dermaga yang perlu lebih ditingkatkan manajemennya;
9. Dukungan prasarana dan sarana kawasan yang belum memadai.

Dari permasalahan tersebut sehingga perlunya pengembangan kawasan dengan konsep *water river front city*.

<sup>11</sup> Penataan Kawasan Sungai Siak Pekanbaru Riau. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah provinsi Sub Dinas Permukiman.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Dalam pengelolaan permukiman di DAS Siak, berdasarkan analisis penulis yang menjadi kendala yaitu lemahnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya lingkungan, tidak adanya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat terhadap rasa kepemilikan terhadap sungai, lemahnya pendanaan dalam menjalankan program yang telah dibuat, lemahnya integritas antar instansi terkait serta pengetahuan masyarakat yang masih belum memadai mengenai pengelolaan DAS yang baik.

### **C. Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Pengelolaan DAS Siak.**

Dalam pengelolaan DAS Siak pemerintah Provinsi Riau di tahun 2011 telah membuat suatu rencana pengelolaan DAS terpadu Siak. Rencana pengelolaan DAS terpadu merupakan rencana jangka panjang 15 tahun, rencana pengelolaan DAS terpadu diharapkan dapat membantu mewujudkan pengelolaan DAS terpadu melalui pendekatan “Satu DAS, Satu Rencana, dan Satu Sistem Pengelolaan Terpadu (One watershed one plan one integrated management).” Tujuan dari pengelolaan DAS terpadu sangat ditentukan oleh karakteristik biofisik, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan yang ada pada tiap DAS.<sup>13</sup>

Dalam pengelolaan DAS terpadu Siak tidak hanya melibatkan peran pemerintah tetapi peran masyarakat dan peran swasta juga terlibat. Monitoring berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian ekosistem DAS Siak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di DAS Siak. Kontrol sosial yang dilakukan oleh

---

<sup>13</sup> Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Siak. Buku I (Buku Utama). Pemerintah Daerah Provinsi Riau Bekerjasama dengan Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan.

masyarakat dalam pengelolaan DAS Siak harus ditunjang dengan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap program-program pengelolaan DAS Siak. Pengelolaan DAS terpadu Siak disusun strategi peningkatan peran swasta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah DAS Siak. Peningkatan peran ini dilaksanakan dalam kegiatan pelibatan secara aktif pihak swasta terhadap program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di DAS Siak.

Dalam pengelolaan DAS terpadu sinergitas dari setiap instansi terkait sangat diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya sinergitas dari instansi-instansi ini sangat sulit terlaksana, karena pada dasarnya setiap instansi memiliki tupoksinya masing-masing dan hanya bekerja berdasarkan tupoksi tersebut tidak adanya komunikasi, koordinasi serta kerjasama yang baik dari instansi-instansi lainnya dalam pengelolaan DAS Siak.

Selain hal tersebut lemahnya komitmen serta ketidaktegasan pemerintah terhadap peraturan yang telah dibuat dalam pengelolaan DAS Siak sehingga pengelolaan DAS terpadu tidak dapat terlaksana.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa;

- Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan DAS Siak berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing instansi pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait di wilayah DAS. Permasalahan di DAS Siak khususnya di bagian hilir DAS Siak yaitu masalah limbah domestik, limbah industri dan permukiman

pengelolaan dari masalah-masalah ini dikelola oleh instansi terkait yaitu masalah limbah pengelolaannya oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, masalah permukiman pengelolaannya oleh Dinas PU bidang permukiman Provinsi Riau sedangkan yang merencanakan dari kegiatan-kegiatan tentang pengelolaan dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan pengelolaannya yang dilakukan dari instansi-instansi pemerintah ini kurang adanya koordinasi serta kerjasama antar instansi yang satu dengan yang lain. Hal ini yang menyebabkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan DAS Siak kurang berjalan.

- Peraturan-peraturan tentang pengelolaan DAS, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan DAS mendapatkan respon yang lemah dari pemerintah daerah provinsi Riau. Hal ini tampak dalam pengelolaan DAS samapai pada tahun 2013 pengelolaan masih dilakukan oleh instansi-instansi terkait belum adanya lembaga khusus yang melakukan pengelolaan terhadap DAS. Dan baru ditahun 2014 adanya Ranperda inisiatif dari komisi B dalam pengelolaan DAS.
- Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan terhadap masalah-masalah yang terdapat di DAS Siak khususnya di bagian hilir DAS Siak. diantaranya dalam pengelolaan limbah industri dan limbah domestik di sungai Siak pemerintah telah mencanangkan program penghijauan di DAS Siak dan program WS Siak. Sedangkan dalam pengelolaan masalah permukiman di DAS Siak pemerintah telah membuat suatu rencana strategis yaitu *water river front city*, perencanaan kawasan sungai (ruang, perairan, bantaran sungai dan lingkungan sekitar

sungai) dimana sungai tidak lagi dimanfaatkan sebagai sisi belakang namun menjadi sisi depan dari pada wajah kota. Dalam pengelolaan DAS Siak pemerintah juga telah membuat suatu program yaitu pengelolaan DAS Siak terpadu yang melibatkan para pihak atau *stakeholders* dari pemerintah provinsi/kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya pengelolaannya program-program yang telah dibuat oleh pemerintah kurang ditindaklanjuti.

## DAFTAR PUSTAKA

- . 2010. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Bandung: Gadjah mada university press.
- Budi Winarno. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress.
- Chay Asdak. 2007. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadaa.
- I. Widarta. 2005. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pondok Edukasi
- J.G. Brouwer dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998)
- Kacung Maridjan. 2011. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Koswara. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Kemandirian Rakyat*. Jakarta: PT Sembrani Aksara Nusantara.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Masbah R.T. Siregar, dkk. 2004. *Road Map Teknologi Pemantauan Daerah*

- Aliran Sungai (DAS) Dan Pengolahan Limbah*. Jakarta: LIPI Press.
- Miftah Thoha. 2012. *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. Yogyakarta: Metapena Institute.
- Miriam Sjofoyan Arif, dkk. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Muchlis. 2010. *Memahami Ilmu Politik Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Paimin, dkk. 2012. *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR)
- Pratiwi, dkk. 2012. *Prociding Workshop Penelitian Dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Bogor: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR).
- Subarsono, M.Si., MA. 2011. *Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: MagnaScript Publishing
- Bilawalanae, Sulawesi Selatan *Watershed Management Institution On Decentralization Contests In Saddang And Bilawalanae Watershed*
- Cahyo Seftyono. 2012. *Pembangunan Berbasis Waterfront dan Transformasi Konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 16 Nomor 1.
- Erik Darmawan. *Pelaksanaan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Cair Di Daderah Aliran Sungai Siak Kota Pekanbaru*.
- Haedar Akib, & Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*.
- Hendro prahasto, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan DAS*. (Peneliti Pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor).
- Jawahir Thontowi. 2009. *Kewenangn Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat dan DIY)*. Vol 12 Nomor 2. Halaman 151.
- N.a.dwi Putri. 2011. *Kebijakan pemerintah Dalam pengendalian pencemaran air sungai siak (studi pada daerah aliran sungai siak bagian hilir)*. *jurnal ilmu pemerintahan*. Vol. 1, Nomor 1.
- Penataan Kawasan Sungai Siak Pekanbaru Riau. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Sub Dinas Permukiman.
- Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Provinsi Riau Paparan Menteri Pekerjaan Umum Pada Acara Seminar Penyelamatan dan Pelestarian Das Siak Di Pekanbaru, 6 Agustus 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 37 Tahun 2012 Tentang  
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai